



PAPER – OPEN ACCESS

Bersahabat dengan Bumi: Modal Simbolik dalam Mitigasi Bencana Alam

Author : Sabiq Manshur
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.625
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Bersahabat dengan Bumi: Modal Simbolik dalam Mitigasi Bencana Alam

Friendly to the Earth: Symbolic Capital in Natural Disaster Mitigation

Sabiq Manshur

Mahasiswa S3 Sosiologi Universitas Hasanuddin, Makassar 90245, Indonesia

Email : Muh.sabiq77@gmail.com

Abstract

Mitigation could not be done from one approach. Environmental degradation, disasters, are social results of human behavior. Excessive exploitation of natural resources, environmentally unfriendly developmentalism, and using of inappropriate technologies are main factors of environmental damage resulted by subjective human choices. The efforts of reducing degradation and mitigating disasters must be begun from cutting off those factors, namely resulted by ideology, theology, and human behaviors that are not pro-conservation acts. The first constraints ideologically are capitalism, developmentalism, and technological barbarism. The second one theologically is a belief that God creates human being as the only one rulers who have the authority for exploitation. The third is a pragmatic human choice that is a short term of self-interest ignores the long term one.

Keywords: Disasters, Phenomenology, Mitigation, Symbolic Capital, Social Behavior;

Abstrak

Mitigasi bencana alam tidak dapat didekati dengan satu disiplin. Kerusakan lingkungan, bencana alam, tidak dapat dipisahkan dari perilaku sosial manusia. Eksploitasi sumber daya alam berlebih, pembangunan tidak ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi tidak tepat guna adalah faktor-faktor yang lahir dari keputusan subjektif manusia. Upaya merawat bumi, termasuk mitigasi bencana, harus dimulai dari pemangkasan akar persoalan yang paling utama, yang secara kategoris bersumber pada ideologi, teologi, dan watak kepribadian manusia sendiri. Kendala merawat bumi dari bencana alam yang bersumber dari ideologi di antaranya paham kapitalisme, developmentalisme pembangunan, dan barbarisme teknologis. Sementara kendala yang bersumber dari teologi berupa keyakinan umat beragama bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa di muka bumi dan dihalalkan melakukan tindak eksploitatif. Terakhir, watak atau kepribadian manusia yang menjadi kendala utama bagi segala upaya penyelamatan bumi dari bencana alam adalah watak eksploitatif-pragmatis, yaitu cara berpikir jangka pendek dan mengabaikan kepentingan generasi mendatang.

Kata Kunci: Bencana, Fenomenologi, Mitigasi, Modal Simbolik, Perilaku Sosial;

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan luar biasa bukan saja dalam aspek sumber daya alam melainkan juga nilai-nilai kearifan lokal, adat-tradisi, dan budaya. Kearifan lokal semacam ini bernilai praktis, bahkan fungsional dalam hal penanggulangan bencana alam. Misalnya, sebagai contoh, adalah kearifan lokal masyarakat Badui, Jawa Barat. Mereka mengetahui cara memotong pohon dan membakar kayu tanpa harus menyebabkan kebakaran hutan. Selain itu, sekalipun rumah-rumah mereka terbuat dari bambu, kayu, pohon palm, namun kekuatan bangunannya mampu menghadapi tantangan alam seperti gempa bumi, tanah longsor, bahkan arus banjir sederhana apapun [1].

Kekayaan bangsa Indonesia yang berupa kearifan lokal semacam ini telah menjelma kesadaran kolektif. Masyarakat Indonesia terus berusaha menerjemahkannya secara lebih rasional dan menjadikannya sebagai rujukan

setiap upaya perencanaan dan perancangan tata kota. Potensi kearifan lokal dalam perencanaan dan perancangan tata kota menjadi dasar filosofis bagi upaya mitigasi bencana alam di mata masyarakat urban. Karenanya, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota sudah mulai sama-sama merujuk pada nilai-nilai lokalitas sebagai standard manajemen mitigasi bencana alam [2].

Kesadaran kolektif masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kearifan lokal direspon dengan kebijakan pemerintah. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), misalnya, membuat media pembelajaran melalui penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan tanah longsor. Buku-buku ini didistribusikan kepada peserta didik mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan utama dari penerbitan dan distribusi buku-buku tersebut adalah memberikan pengertian yang mendalam sejak dini tentang apa itu bencana alam dan kewajiban manusia melestarikan alam guna mengurangi efek mematikan dari alam itu sendiri. Berdasarkan statistik, dalam kurun waktu tahun 2005-2011, tercatat kejadian longsor sebanyak 809 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.484 orang [3].

Langkah preventif dan upaya mitigasi tetap menjadi unggulan. Sampai detik ini, belum ada sebuah teknologi yang secara akurat dapat memprediksi detik, jam, hari, dan tanggal kapan sebuah bencana alam akan terjadi dan berlokasi di mana. Semua upaya yang dilakukan masih berkuat pada tahap antisipasi. Salah satu tindakan antisipatif yang dinilai paling efektif adalah jalur pendidikan untuk penyadaran. Memberikan penyadaran, pendidikan berkelanjutan, dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan semua elemen masyarakat dari berbagai level usia adalah langkah preventif paling efektif. Program-program pelatihan dan pendidikan semacam ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan mitigasi bencana alam, sebab 60% area di negara Indonesia ini merupakan wilayah yang terancam gempa bumi, tsunami, letusan gunung merapi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kerusakan biodiversitas. Drajat Suhardjo menyarankan agar desain kurikulum bagi pendidikan maupun pelatihan diarahkan untuk, salah satunya, memasukkan kearifan local [4].

Urgensi kearifan lokal dalam mitigasi bencana melengkapi mitigasi bencana alam berbasis sains dan teknologi. Mitigasi bencana alam perlu dilakukan dengan melandaskan pada visi komprehensif antara perkembangan saintifik mutakhir dan warisan kearifan lokal. Teknologi lingkungan yang terus berkembang ke arah yang semakin canggih masih perlu diadopsi [5].

Urgensi pendekatan kearifan lokal dan pendekatan saintifik ini terkait erat dengan penyadaran, kognisi, dan pendidikan. Akhmad Muktaf Haifani mengatakan, proses mitigasi adalah rangkaian beberapa tindakan, yang seharusnya diambil sebelum terjadinya suatu bencana, dengan tujuan pengurangan resiko bencana. Langkah-langkah antisipatif ini harus terintegrasi dengan sistem pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Haifani juga menyarankan agar perencanaan wilayah dilakukan dengan baik, media informasi tersedia lengkap, dan komunitas semakin kritis serta *uptodate*. Sarana prasarana ini perlu dilengkapi untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap kemungkinan datangnya bencana [6].

2. Kajian Literatur

Penelitian paper ini bertujuan untuk melengkapi sekian banyak pandangan tokoh dan temuan riset. Sedikit penelitian yang memandang bahwa bencana alam adalah dampak dari bencana kemanusiaan. Sebagian peneliti bencana alam adalah bencana sosial kemasyarakatan itu sendiri, seperti kasus Lumpur Lapindo [7]. Henny Pratiwi Adi mengatakan, alam sudah tidak kuat lagi menerima beban lingkungan, sebagian besar bencana disebabkan oleh faktor manusia yang kurang memperhatikan dampak kerusakan lingkungan [8].

Upaya mitigasi bencana perlu dilakukan dengan memaksimalkan semua peluang dan potensi yang ada. Selain modal kapital dan modal sosial, manusia memiliki modal simbolik, yang juga dapat digunakan untuk mengurangi dan menanggulangi potensi bencana alam sejak dini, bahkan sejak dalam pikiran manusia. Modal simbolik adalah akumulasi dari prestise, martabat atau kehormatan, yang di antaranya dapat berupa agama, ideologi, kepribadian, bahkan teknologi [9]. Lebih dari itu, modal simbolik juga persoalan status, otoritas dan legitimasi. Modal simbolik ini sebagai basis paling dominan [10]. Karenanya, optimalisasi terhadap semua modal simbolik adalah langkah alternatif upaya mitigasi bencana.

Terminologi ‘bencana kemanusiaan’ yang dimaksud dalam paper ini, di antaranya eksploitasi sumber daya alam berlebih, pembangunan tidak ramah lingkungan, penggunaan teknologi tidak tepat guna, watak atau kepribadian

manusia yang cenderung merusak, merupakan wilayah-wilayah kerja bagi pemegang otoritas dan pemilik legitimasi untuk mengoptimalisasikan modal-modal simbolik. Pemerintah, kaum akademisi, maupun masyarakat dari segala level sosial harus bekerjasama untuk meminimalisir dan mengantisipasi bencana kemanusiaan semacam ini [11]. Modal simbolik harus dioptimalisasi supaya perilaku negatif manusia penyebab bencana alam semakin berkurang.

Bencana alam menurut pemimpin komunitas Tarekat Muktabarah, Habib Luthfi bin Yahya, merupakan sekaligus disebabkan oleh bencana kemanusiaan, yang ditimbulkan oleh perilaku manusia. Habib Luthfi mengatakan bahwa bencana alam adalah efek luaran dari bencana kemanusiaan. Dengan pendekatan filosofis-fenomenologis, bencana alam dipahami sebagai dampak buruk dari perilaku sosial manusia. Karenanya, mengantisipasi bencana alam perlu dimulai dari perbaikan mentalitas dan kepribadian manusia itu sendiri. Lebih jauh lagi, tindakan sosial yang eksternal itu lahir dari pikiran internal manusia. Mitigasi bencana harus dimulai dari perkara paling fundamental, yaitu memperbaiki pikiran manusia agar menjadi lebih positif. Pikiran yang positif melahirkan tindakan sosial yang positif, dan tindakan yang positif melahirkan lingkungan hidup yang positif. Pencegahan dan pengurangan efek bencana alam dimulai dari pembentukan pikiran dan tindakan yang positif [12].

Perilaku sosial yang negatif, pada akhirnya, berdampak buruk pada alam. Ulil Amri memberikan pandangan yang lebih tentang kasus China dan Papua Nugini. Amri mengatakan, globalisasi berdampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan manusia di Asia Pasifik. Keamanan manusia semakin terancam, dan pada saat yang bersamaan kondisi lingkungan terus merosot ke titik yang mengerikan. Papua Nugini dan China adalah kasus dimana pemerintah setengah hati melakukan pencegahan terhadap degradasi lingkungan, yang menyebabkan kehidupan manusia semakin terancam. Globalisasi dan seluruh kepentingan yang dikandungnya menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan dan ancaman utama kehidupan manusia [13].

Premis yang serupa dengan contoh berbeda diajukan oleh Akhsanul Ni'am Laksono dan Musssadun. Dua tokoh ini mengatakan, peningkatan jumlah turis domestik maupun mancanegara bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, penambahan jumlah wisatawan berdampak positif, yakni perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah wisatawan menjadi faktor kerusakan lingkungan, seperti terumbu karang di Pulau Karimunjawa. Aktifitas ekowisata berdampak negatif. Banyak masyarakat yang menilai bahwa ekowisata membawa keuntungan kapital sekaligus kerusakan alam dan lingkungan [14].

Kerusakan alam juga disebabkan oleh faktor-faktor kultural, tepatnya budaya yang negatif. Sebagai contoh, kerusakan lingkungan disebabkan oleh cara berpikir masyarakat yang patriarkis. Perempuan tidak diberi kebebasan berekspresi dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, terlebih dalam rangka berperan aktif menjaga lingkungan dan alam. Manajemen tata kelola lingkungan yang patriarkis lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat. Pada saat bersamaan, kaum perempuan disalahkan dan dituduh bertanggungjawab terhadap semua bentuk kerusakan alam dan lingkungan [15].

Alhasil, bencana alam tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Sangat banyak variabel dan pendekatan yang perlu digunakan secara lebih komprehensif, untuk menempatkan persoalan pada duduk perkara yang sebenarnya. Faktor-faktor ideologis yang berada di balik kerusakan alam, lingkungan, dan lahirnya bencana merupakan perkara pokok dalam kajian sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor-faktor sosiologis bencana alam, dan langkah-langkah mitigasi alternatif yang berlandaskan pada pendekatan sosiologi kemasyarakatan.

3. Metodologi

Penelitian ini adalah riset sosiologis dengan pendekatan fenomenologi sosial. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini diharapkan mampu menangkap fenomena sosial secara relatif lebih utuh [16]. Fenomenologi adalah disiplin filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Dalam teori fenomenologi, fenomena diyakini berada dalam *consciousness* atau kesadaran seseorang. Kesadaran menjadi perkara penting yang harus diteliti untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya, *noumena*.

Dalam fenomenologi, *noumena* menampakkan diri kepada dalam bentuknya yang asli kepada manusia, termasuk kepada peneliti. Satu-satunya cara untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya adalah membebaskan diri dari segala jenis bentuk penilaian, prasangka, dan asumsi apapun sebelum melakukan penelitian. Penelitian fenomenologis adalah penelitian untuk menangkap kenyataan sebagaimana adanya. Edmund Husserl menyebut tugas peneliti adalah membebaskan diri dari prasangka [17].

Pendekatan fenomenologis dari Edmund Husserl menjadi penting di sini, karena salah satunya memberikan ruang analisa yang penting pada urusan bahasa. Bagi Husserl, bahasa sangat erat kaitannya dengan pikiran seseorang, sebab fenomena hanya dapat diamati melalui orang yang mengalami fenomena tersebut [18].

Husserl mengembangkan fenomenologinya menjadi fenomenologi murni di mana objek dari fenomenologi adalah fenomena murni. Menurut Husserl fenomena murni adalah fenomena yang bebas dari proses rasionalisasi. Fenomena murni adalah data asli yang dapat ditangkap oleh kesadaran manusia [18].

Penggunaan fenomenologi Husserl sebagai sebuah metode penelitian sangat sulit karena Husserl tidak pernah menerjemahkan filosofinya menjadi suatu metode penelitian yang terstruktur [19]. Walaupun demikian terdapat banyak metode penelitian fenomenologi yang dianggap paling cocok dan sesuai dengan filosofi Husserl seperti metode Spiegelberg [20].

Spiegelberg menjelaskan bahwa terdapat enam elemen dasar fenomenologi yang umum dilakukan saat menelaah sebuah fenomena. Elemen-elemen tersebut meliputi menelaah fenomena, menelaah esensi dan pola hubungan antar esensi dari suatu fenomena, menelaah pola perwujudan suatu fenomena, mengeksplorasi struktur fenomena dalam kesadaran manusia, *bracketing*, dan menginterpretasikan makna implisit dari sebuah fenomena. Dari keenam elemen dasar fenomenologi hanya tiga elemen yang paling sesuai dengan filosofi fenomenologi menurut Husserl [19].

Pertama, *bracketing*. Bracketing bertujuan untuk membantu peneliti memahami fenomena apa adanya. Proses *bracketing* berlangsung secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Pada fase awal penelitian seorang peneliti harus mengidentifikasi dan menyimpan sementara asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki tentang fenomena yang diteliti agar mampu berkonsentrasi pada setiap aspek fenomena, merenungkan esensi dari fenomena dan menganalisis serta mendeskripsikan fenomena [19]. *Bracketing* tidak hanya dilakukan oleh peneliti tetapi dilakukan juga oleh partisipan [18].

Kedua, telaah. Menelaah fenomena meliputi proses eksplorasi, analisis, dan deskripsi fenomena untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam dari fenomena. Tiga langkah untuk menelaah fenomena, meliputi intuiting atau merenungkan, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena. Intuiting adalah langkah awal di mana seorang peneliti mulai berinteraksi dan memahami fenomena yang diteliti [21].

Ketiga, struktur esensial. Fenomenologi meyakini bahwa suatu fenomena mempunyai struktur esensial. Struktur esensial ini dibentuk oleh esensi atau elemen dasar yang saling berhubungan. Untuk memahami struktur esensial suatu fenomena dilakukan proses telaah terhadap esensi dan pola hubungan antar esensi dari fenomena. Pada dasarnya proses menelaah esensi meliputi proses intuiting dan analisis. Setelah esensi dan pola hubungannya teridentifikasi maka struktur esensial dari fenomena yang diteliti dapat disusun.

Teori yang digunakan adalah teori Habitus dari Pierre Felix Bourdieu. Fenomena kerusakan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia sendiri dan berbagai upaya mitigasi yang multidisipliner, tidak dapat dipahami dengan utuh tanpa melihatnya dari teori tindakan sosial. Teori agen dan struktur dari Bourdieu bertujuan untuk mengatasi oposisi absurd antara subjektifisme dan objektifisme [22]. Bourdieu memusatkan perhatiannya pada hubungan dialektis antara struktur objektif dengan fenomena subjektif [23].

Struktur objektif sebagai sesuatu yang terlepas dari kesadaran dan kehendak agen. Kehendak agen ini mampu menghambat atau mendorong praktik dan representasi struktur. Inti teori struktur dan agen dari Bourdieu ini terletak pada teori tentang Habitus dan Arena. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang mendorong seseorang berhubungan dengan dunia sosial. Manusia memiliki struktur internal yang bisa digunakan untuk mempersepsi, memahami dan apresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial [22].

Habitus manusia ini memiliki tujuh elemen penting: 1) produk sejarah, 2) kondisi sosial tertentu, 3) struktur yang lahir dari kondisi sosial, yang berfungsi memberikan kerangka konseptual, persepsi, representasi, dan tindakan, 4) watak habitus yang *transporable*, dimana satu tindakan bisa dialihkan ke tempat lain, 5) habitus bersifat pra-sadar, 6) habitus bersifat teratur dan berpola, dan 7) habitus dapat diarahkan untuk menghasilkan tujuan dan tindakan tertentu.

Sedangkan arena adalah konsep relasional, bukan struktural. Arena adalah jaringan relasi yang terjadi di antara setiap posisi yang berada di dalam arena tersebut. Relasi-relasi ini berada di luar kehendak dan kesadaran individu sosial [24].

Bourdieu memberikan langkah praktis untuk menganalisa arena ini. Terdapat tiga langkah untuk menganalisa sebuah arena: 1) menggambarkan kekuasaan untuk menemukan hubungan antara lingkungan tertentu dengan lingkungan politik, 2) menggambarkan struktur objektif di antara berbagai posisi yang ada, dan 3) menentukan ciri-ciri kebiasaan agen yang berada pada berbagai level sosial yang berbeda-beda [22].

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara sosiologis, bencana alam lahir dari bencana kemanusiaan. Upaya pencegahannya pun harus dimulai dari perbaikan perilaku dan tindakan sosial. Tindakan manusia, baik individual maupun kolektif, merupakan penyebab utama dari bencana alam. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah titik awal dari bencana alam, sebab tindakan manusia lahir dari kesadaran.

4.1. Faktor Sosiologis Bencana Alam

Setidaknya ada tiga faktor sosiologis utama yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Ketiga faktor tersebut adalah : pertama, tindakan manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Kedua, tindakan manusia dalam melakukan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ketiga, tindakan manusia dalam memanfaatkan teknologi yang berlebihan dan tidak tepat guna.

4.1.1. Eksploitasi Sumber Daya Alam Berlebih

Masyarakat Indonesia telah merasakan dampak langsung dari bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang dilakukan oleh para kapitalis. Pengerukan sumber kekayaan alam sudah melampaui batas kewajaran, bahkan sudah sangat beringas dan bejat dengan dibuktikan oleh ketidakpedulian mereka terhadap hak rakyat kecil dan para pemilik sah lahan. Salah satu komunitas yang menaruh konsentrasi serius terhadap kerusakan alam dan lingkungan akibat kebijakan-kebijakan negara yang anti-rakyat ini adalah akun instagram Jogja Darurat Agraria. Selain mengelola instragram, komunitas tersebut juga mengelola twitter: @JDAgraria dan Facebook: Jogja Darurat Agraria. Identitas komunitas ini adalah saluran informasi dan jejaring solidaritas perjuangan ruang hidup warga Jogja dan Indonesia [25].

Banyak sekali isu-isu yang diangkat oleh komunitas Jogja Darurat Agraria ini. Di antara sebagian kecilnya saja adalah seruan aksi menolak kriminalisasi pejuang lingkungan, menolak pengusuran lahan oleh aparaturnegara, penolakan alih fungsi lahan produktif, penolakan penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam yang dinilai akan berorientasi bonafit dan dikelola kapitalis dan merusak alam, penolakan perusahaan-perusahaan tambang yang terus merusak lingkungan, dan banyak lainnya. Secara umum, Jogja Darurat Agraria adalah representasi gerakan aksi masyarakat tertindas dalam melawan kebijakan pemerintah dan bisnis kapitalis.

Sebuah riset akademik, dalam konteks berbeda, menggambarkan tentang perlawanan komunitas sastrawan lokal di Kalimantan Timur terhadap pengrusakan alam dan hutan mereka. Melalui media sastra, komunitas sastrawan ini memperjuangkan idealisme mereka agar kebijakan pemerintah lebih menghargai alam, tidak menjadi budak kaum kapitalis, dan tidak juga mengabaikan kekayaan sosial-budaya yang setiap wilayah. Dengan menjadikan kerusakan alam Kalimantan Timur, komunitas sastrawan ini merepresentasikan diri mereka sebagai komunitas pejuang lingkungan hidup dan melawan setiap kebijakan pemerintah dan bisnis korporasi besar yang menjunjung tinggi nilai keuntungan material dan mengabaikan nilai-nilai lainnya [26].

Semua perlawanan masyarakat dan label-label negatif yang dikumandangkan oleh berbagai komunitas berbeda tersebut adalah hal lumrah dan sangat masuk akal. Berdasarkan sebuah laporan riset di tahun 2009, kerusakan hutan alam di Indonesia sudah sangat parah. Yakni, mencapai 59,63 juta hektar. Kawasan hutan alam yang rusak terdiri dari hutan konservasi mencapai 4,7 juta hektar, hutan lindung mencapai 10,5 juta hektar, dan hutan alam produksi mencapai 44,4 juta hektar. Bahkan, intensitas eksploitasi pohon hutan selama 4 dekade, menurut laporan tersebut, sudah sangat mengkhawatirkan. Eksploitasi besar-besaran terhadap pohon kayu semakin tidak terkendali. Kawasan-kawasan konservasi pun harus dikorbankan, seperti taman nasional dan hutan lindung di Sumatera [27].

4.1.2. Pembangunan Tidak Ramah Lingkungan

Sering kali, eksploitasi sumber daya alam dilakukan oleh pihak otoritas atas nama pembangunan. Namun, pembangunan yang terjadi malah meninggalkan jejak yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah selalu tidak ramah lingkungan. Saran melihat kebijakan politik pemerintah yang berdampak pada kerusakan lingkungan telah banyak dilakukan.

Wasisto Rahardjo Jati, misalnya, mengatakan bahwa paradigma developmentalisme pemerintah masih menghantui publik. Kebijakan politik yang mengarah pembangunan dan eksploitasi alam lebih banyak menghasilkan kerusakan dan kerugian material daripada keuntungan berjangka panjang. Sekalipun alam menyediakan sumber daya yang

melimpah, manajemen yang tidak baik hanya melahirkan kerugian daripada keuntungan. Wasisto pun menganjurkan bahwa pemerintah harus melakukan pendekatan lain dan meninggalkan paradigma developmentalisme yang merusak. Salah satu alternatif yang bisa ditempuh adalah pendekatan ekologi politik, yakni suatu kebijakan politik yang berpihak pada kelestarian lingkungan, demi menghindari bencana alam yang jauh lebih besar. Tata kelola sumber daya alam yang tidak didukung oleh ekologi politik tidak berguna untuk pemenuhan kebutuhan manusia dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang [28].

Kebijakan pemerintah menjadi kata kunci keberhasilan pencegahan kerusakan alam dan mitigasi bencana di masa depan. Pengelolaan yang baik, penataan ruang publik yang benar, dapat menanggulangi bencana sejak awal. Namun, semua bentuk kebijakan tetap bergantung sepenuhnya terhadap kesadaran subjektif individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Salah satu contoh kebijakan yang positif demi terciptanya pembangunan yang ramah lingkungan adalah pembuatan sertifikasi lingkungan. Sebuah penelitian yang mengangkat tema sertifikasi lingkungan pada hotel bintang lima mengatakan bahwa sertifikasi lingkungan sangat positif. Sekalipun implementasi sertifikasi lingkungan secara filosofis tidak mencerminkan *deep ecology*, tetapi berdampak positif pada lingkungan fisik, khususnya pada hotel bintang lima di kawasan pariwisata. Dampak positif sertifikasi ini di antaranya implemantasi *environment management system*, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3, penggunaan produk lokal, penghematan penggunaan energi dan air, serta penataan lingkungan secara umum [29].

4.1.3. Penggunaan Teknologi Tidak Tepat Guna

Teknologi seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi mempercepat pekerjaan manusia, menghemat waktu, dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien. Tetapi, penggunaan teknologi dengan cara-cara yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana alam yang parah. Keputusan dan penelitian apakah sebuah teknologi perlu digunakan atau tidak, terlepas pada keputusan subjektif manusia sendiri. Karenanya, teknologi hanya menjadi instrumen dan akar penyebab kerusakan tetapi pada tindakan sosial manusia, secara individual maupun kolektif, terlebih dalam memanfaatkan teknologi.

Dengan mengangkat sebuah kasus pada 22 areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Thalib [30] menulis tentang kerusakan hutan akibat eksploitasi dengan sistem traktor dan *highlead*. Dari 22 HPH, 19 HPH menerapkan sistem traktor dan 3 HPH menerapkan sistem *highlead*. Dari 19 pengguna sistem traktor, 6 buah di antaranya terletak di Sumatera (Riau, Sumbar, Jambi dan Sumsel) dan 13 buah lagi di Kalimantan (Kaltim, Kalsel, dan Kalteng). Menurut laporan Thalib, sekalipun sebagian besar HPH melaksanakan pembagian blok dan petak tebangan, penandaan pohon dan penomoran pohon, tetapi semua tidaklah terlaksana. Jumlah pohon berdiameter 35 cm ke atas di dalam petak tebangan tidak diketahui secara pasti dan karenanya tidak jelas pula jumlah pohon yang diperkenankan ditebang berdasarkan asas pelestarian. Thalib juga melaporkan bahwa dua sistem eksploitasi yang digunakan sama-sama tidak berjalan. Akibatnya penebangan semata-mata bergantung pada kemauan para *blandong* tanpa mempertimbangkan jumlah pohon lain yang akan tertimpa dan menjadi rusak [30].

Teknologi selalu berbahaya dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan khususnya dan alam pada umumnya apabila tidak disertai oleh komitmen manusia yang positif. Sains dan teknologi yang tidak dibarengi komitmen moral individu hanya akan melahirkan kecerobohan dan kerugian material. Contoh penelitian tahun 2001 yang dilakukan oleh Sona Suhartana mengatakan bahwa kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon (kerusakan pohon) akibat *penyaradan*—salah satu kegiatan dari serangkaian kegiatan pemanenan kayu. Fungsi *penyaradan* adalah memindahkan kayu dari tempat penebangan ke tempat pengumpulan sementara—berwawasan lingkungan (PBL) berkisar antara 10,2-14,3% dengan rata-rata 12,5%. Secara rata-rata dapat dikatakan bahwa untuk menyarad kayu 8,5 pohon dalam tiap hektar telah menimbulkan kerusakan sebanyak 18,1 pohon ($12,5\% \times [153,5-8,5]$). Sedangkan rata-rata jumlah pohon berdiameter 20 cm ke atas yang sehat setelah kegiatan *penyaradan* adalah 126,9 pohon tiap hektar [31].

4.2. Langkah Preventif dan Mitigasi

Bencana alam yang lahir akibat tindakan manusia harus dicegah sejak dalam pikiran. Tindakan manusui, seperti kegiatan yang menyebabkan pengrusakan pada alam, lahir dari kesadaran kognitif. Memperbaiki kesadaran sama saja sebagai langkah preventif dan mitigasi/pengurangan terhadap kemungkinan bencana yang lebih parah di masa depan. Beberapa aspek yang berhubungan erat dengan kognisi manusia adalah ideologi dan teologi. Sementara pilihan

seseorang terhadap ideologi dan teologi tertentu dipengaruhi oleh keputusan subjektif yang pra-kesadaran, pra-rasionalitas. Karenanya, aspek penting lain selain ideologi dan teologi adalah kepribadian manusia itu sendiri. Watak atau karakter kepribadian seseorang turut serta menjadi sumber tindakan sosial, dan karenanya upaya preventif dan mitigasi bencana juga penting dimulai dari tigas aspek ini.

4.2.1. Ideologi Hijau

Ideologi Hijau juga dikenal sebagai Politik Hijau, yaitu ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat peduli lingkungan hidup, yang memiliki akar-akar pemikirannya pada pemahaman tentang pentingnya lingkungan hidup, anti-kekerasan, demokrasi akar rumput dan keadilan sosial [32]. Semangat ideologi hijau ini harus dikombinasikan dengan “kapitalisme”, yang selama ini dimaknai oleh para pendukung sebagai positif namun negatif oleh penentangannya.

Kombinasi *Green Politics* dengan proyek kapitalisme dapat saja secara positif dan apresiatif melahirkan Kapitalisme Hijau (*eco-capitalism*). Sekalipun tidak sepenuhnya bisa diyakini bahwa kapitalisme hijau ini mampu mewujudkan cita-citanya yang mulai, yaitu memwujudkan kebijakan politik dan pemerintahan yang berpihak pada pemecahan problem lingkungan hidup dan alam [33], tetapi setidaknya akan mengurangi efek buruk kapitalisme itu sendiri.

Kebijakan politik pemerintah yang pro-lingkungan dapat didekati dengan pendekatan Pembangunan Hijau (*green developmentalism*). Yaitu, suatu pemahaman tentang institusi dan regulasi keuangan untuk pembangunan yang berpihak pada upaya tetap menjaga kelestarian alam [34]. Sekalipun tidak sepenuhnya dapat dipercaya, setidaknya *green developmentalism* lebih bisa dipercaya dibanding *developmentalism* yang tidak pro lingkungan. Terakhir, teknologi hijau juga menjadi instrumen praktis dalam upaya menjalankan kebijakan berbasis pembangunan hijau. Teknologi Hijau bertujuan untuk mendampingi kebijakan politik dan pembangunan pemerintah agar tetap memperhitungkan lingkungan dan alam [35].

4.2.2. Teologi Hijau

Keyakinan umat beragama bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa di muka bumi dan dihalalkan melakukan tindak eksploitatif berdampak buruk. Manusia tidak untuk mengeksploitasi tetapi untuk merawat dan memelihara. Teologi Hijau (*green theology*) adalah pengenalan kembali tentang keyakinan dan pengetahuan ilahiah yang pro-lingkungan hidup [36]. Semua agama memiliki keyakinan tentang kewajiban memelihara, merawat, dan menjaga alam.

Syariat Islam menurut Fachruddin M. Mangunjaya [37] mengajarkan keadilan dalam menata lingkungan dan ekosistem di bumi. Allah swt menciptakan alam dan seisinya sebagai karunia besar untuk manusia, dan karenanya Allah memberikan ketentuan agar manusia tetap memelihara dan merawat alam semesta ini. Masalah lingkungan hidup dewasa ini semakin kompleks dan luas, dan para fuqaha' telah menciptakan *nizham* atau jurisprudensi Islam yang mengatur bagaimana seharusnya manusia memelihara kelestarian lingkungan hidup [37].

4.2.3. Watak dan Kepribadian

Terakhir, watak manusi menjadi kendala utama bagi segala upaya penyelamatan bumi dari bencana alam. Sekalipun telah tersedia ideologi dan teologi yang pro alam dan lingkungan, watak pragmatis manusia belum tentu satu visi dan satu tujuan. Pilihan positif bagi sebagian komunitas belum tentu pilihan terbaik bagi komunitas sosial lain. Sebagian orang yang memiliki untuk berpikir demi tujuan jangka panjang, sebagian yang lain memiliki kepentingan jangka pendek dan mengabaikan kepentingan generasi mendatang.

Mentalitas manusia menjadi perkara penting yang juga perlu diarahkan pada apa yang disebut sebagai “kepribadian hijau” atau *green mentality*. Masyarakat perlu memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan, termasuk mendorong dan mengontrol kebijakan pemerintah dengan standar-standar kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Mentalitas ini hanya terbentuk tatkala kesadaran kolektif diperjuangkan dengan berbagai cara. Kesadaran kolektif semacam ini telah terjadi di belahan dunia lainnya [38].

5. Kesimpulan

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab lahirnya bencana alam, yaitu perilaku masyarakat yang destruktif. Destruksi tersebut dapat saja disebabkan oleh faktor-faktor seperti ideologi, teologi, dan kepribadian manusia sendiri.

Perilaku manusia yang tidak terkontrol dan hanya memenuhi hasrat yang tidak terbatas dapat menimbulkan kerusakan alam. Bencana alam hanya efek luaran atau output dari bencana kemanusiaan itu sendiri.

Alternatif penanganan, pengurangan maupun pencegahan bencana alam dapat dimulai dari perbaikan-perbaikan berbagai dimensi perilaku sosial itu sendiri. Perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan bumi melahirkan 'perlawanan' dari bumi itu sendiri. Manusia yang cenderung melakukan kerusakan di bumi akan mendapatkan hukuman dari bumi itu sendiri, seperti bencana alam. Bersahabat dengan bumi menjadi pilihan terbaik untuk mencegah dan mengurangi efek mematikan dari bencana di muka bumi.

Ideologi Hijau, Teologi Hijau, dan Kepribadian Hijau adalah kata kunci yang menjadi pokok utama mitigasi bencana alam. Tiga aspek ini perlu diperbaiki sebagai komitmen kemanusiaan untuk bersahabat dengan alam, dengan lingkungan, dan dengan bumi tempat manusia menjalani hidup dari lahir hingga kematian menjemput.

Referensi

- [1] Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2011). Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, Vol. 15 No. 1 Juli, 67-75.
- [2] Wikantiyoso, R. (2010). Mitigasi Bencana di Perkotaan : Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota. *Jurnal Local Wisdom*, 2, 18-29.
- [3] Arifianti, Y. (2011). Buku Mengenal Tanah Longsor Sebagai Media Pembelajaran Bencana Sejak Dini. *Bulletin Vulaknologi dan Bencana Geologi*, 6 (3), 17-24.
- [4] Suhardjo, D. (2011). Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Mengurangi Resiko Bencana. *Cakrawala Pendidikan*, Juni, Th. XXX, No. 2, 174-186.
- [5] Rusilowati, A., Supriyadi, Binadja, A., & Mulyani, S. (2012). Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology and Society. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 8, 51-60.
- [6] Haifani, A. M. (2008, Agustus 2). Manajemen Resiko Bencana Gempa Bumi (Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006). *Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir*, hal. 285-292.
- [7] Novenanto, A. (2010). Melihat Kasus Lapindo Sebagai Bencana Sosial. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23 (1), 63-75.
- [8] Adi, H. P. (2011, Juli 26). Kondisi dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan di Jawa Tengah. *Seminar Nasional Mitigasi dan Ketahanan Bencana*, hal. 1-9.
- [9] Wati, K. S. (2015). Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita, 2 (5). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1-23.
- [10] Pryhantoro, E. H. (2016). *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Tuban: Spasi.
- [11] Handayani, R. (2011). Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah* (hal. 207-213). Banten: LAB-ANE FISIP Untirta.
- [12] Nawawi, I. (2019, Januari 07). *Bencana Alam di Mata Habib Luthfi*. Dipetik Maret 2019, dari alif.id: <https://alif.id>
- [13] Amri, U. (2016). Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik: Kasus China dan Papua Nugini. *Jurnal Kajian Wilayah*, 2 (1), 56-71.
- [14] Laksono, A. N., & Mussadun. (2014). Dampak Aktivitas Ekowisata di Pulau Karimunjawa Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Teknik Perencanaan Kota*, 3 (2), 262-273.
- [15] Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1 (1), 105-130.
- [16] Connolly, P. (2002). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- [17] Husserl, E. (2001). *Logical Investigation*. New York: Routledge.
- [18] Crotty, M. (1996). *Phenomenology and Nursing Research*. Melbourne: Churchill Livingstone.
- [19] Spiegelberg, H. (1978). *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- [20] Streubert, H., & Carpenter, D. (1999). *Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. (2nd ed)*. Philadelphia: Lippincott.
- [21] Carpenter, D. (1999). Phenomenology as Method . Dalam H. S. Carpenter, *Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative*. Philadelphia: Lippincott.
- [22] Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- [23] Jenkis, R. (2002). *Pierre Bourdieu*. New York: Routledge.
- [24] Bourdieu, P. F., & Wacquant, L. J. (1992). The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Work Shop). Dalam P. B. (ed.), *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University Chicago Press.
- [25] Jogja Darurat Agraria. (2019, Maret 11). *Jogja Darurat Agraria*. Dipetik Maret 11, 2019, dari https://instagram.com/jogja_darurat_agraria?utm_source=ig_profile_share&igshid=dd7cqtvjxoqp
- [26] Utomo, I. B. (2014). Kerusakan Alam Kalimantan Timur di Mata Sastrawan Lokal. *Atavisme*, 17 (1), 17-28.

- [27] Zuhud, E. A. (2009). Potensi Hutan Tropika Indonesia Sebagai Penyangga Bahan Obat Alam untuk Kesehatan Bangsa. *Jurnal Bahan Alam Indonesia*, 6 (6), 227-232.
- [28] Jati, W. R. (2013). Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik. *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 3 (2), 98-111.
- [29] Murni, N. G., & Damayanti, I. A. (2017). Dampak Sertifikasi Lingkungan terhadap Lingkungan Fisik pada Hotel Bintang Lima di Kawasan Nusa Dua. *Jurnal Sosial dan Huamniora*, 6 (2), 179-186.
- [30] Thalib, J. (1986). Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Eksploitasi Dengan Sistem Traktor dan Highlead. *Jurna Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 2, No. 4, 14-18.
- [31] Suhartana, S. (2002). Dampak Pembalakan Berwawasan Lingkungan (PBL) terhadap Kerusakan Tegakan dan Biaya Penyaradan di Hutan Produksi Alam. *BULLETIN PENELITIAN HASIL HUTAN*, Vol. 20, No. 4, 285-301.
- [32] Wall, D. (2010). *The No-nonsense Guide to Green Politics*. United Kingdom: New Internationalist Publications Ltd.
- [33] CollinsDictionary. (2015, November 27). *Eco-Capitalism*. Dipetik Maret 12, 2019, dari www.collinsdictionary.com
- [34] McAfee, K. (1991, April 1). *Environment and Planning D : Society and Space*. Dipetik Maret 12, 2019, dari *Selling Nature to Save It? Biodiversity and Green Developmentalism*: <https://journals.sagepub.com>
- [35] Green Technology. (2019). *Our Green Future: Cultivating Change*. Dipetik Maret 12, 2019, dari *Green Technology - What is it ?*: <https://green-technology.org>
- [36] Wielenga, B. (1999). *Towards an Eco-just Society*. Bangalore: CSA.
- [37] Fachruddin M, M. (2006). *Hidup Harmonis dengan Alam : Esai-esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi, dan Keankaragaman Hayati Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [38] Delaney, T., & Madigan, T. (2014). *Beyond Sustainability : A Thriving Environment*. USA: McFarland.